



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran Ia Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor : 40
Tanggal : 29 December 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.722.563.823.500,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	205.810.310.500,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	34.942.500.000,00	
4.1.1.01.14	Hotel	190.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010
4.1.1.02	Pajak Restoran	190.000.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	1.000.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	
4.1.1.03.20	Pajak Hiburan	75.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010
4.1.1.04	Pajak Reklame	75.000.000,00	
4.1.1.04.12	Reklame	650.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	650.000.000,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	11.505.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	11.500.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	5.000.000,00	
4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	500.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010
4.1.1.07	Pajak Parkir	500.000,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	22.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	22.000.000,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	200.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.300.000.000,00	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perdesaan Perkotaan	17.300.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010
4.1.1.12	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.300.000.000,00	
4.1.1.12.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.000.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 12 Tahun 2010
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.643.216.555,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.781.165.000,00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 9 tahun 2009
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	75.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 10 Tahun 2010
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	1.195.665.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	644.500.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011
4.1.2.01.10	Retribusi Pelayanan Pendidikan	16.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	4.983.051.565,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	1.006.810.235,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	104.641.280,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	20.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	102.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	3.713.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011
4.1.2.02.14	Retribusi MCK	31.600.000,00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	879.000.000,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	620.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	216.500.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011
4.1.2.03.04	Retribusi Trayek	42.500.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.465.035.000,00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	15.273.345.000,00	
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah Air Minum	3.537.595.000,00	
4.1.3.01.02	PD. BPR Bank Wonosobo	3.905.000.000,00	
4.1.3.01.03	PD BPR BKK Wonosobo	1.080.000.000,00	
4.1.3.01.04	PD Bhakti Husada	45.750.000,00	
4.1.3.01.05	PT Bank Jateng	6.500.000.000,00	
4.1.3.01.06	PD BKK Kertek	205.000.000,00	
4.1.3.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	1.191.690.000,00	
4.1.3.03.01	PT Tambi	1.150.000.000,00	
4.1.3.03.02	PT Birmolukar (Apotik Cahaya)	41.690.000,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	145.759.558.935,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	69.900.000,00	
4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah	1.000.000,00	
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	10.000.000,00	Permendagri Nomor 29 Tahun 2016
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	2.000.000,00	Permendagri Nomor 29 Tahun 2016
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	5.000.000,00	Permendagri Nomor 29 Tahun 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.4.01.10 4.1.4.01.20 4.1.4.02 4.1.4.02.01 4.1.4.02.02 4.1.4.03 4.1.4.03.01 4.1.4.03.02 4.1.4.03.03 4.1.4.04 4.1.4.04.01 4.1.4.04.02 4.1.4.08 4.1.4.08.01 4.1.4.10 4.1.4.10.06 4.1.4.14 4.1.4.14.01 4.1.4.14.02 4.1.4.16 4.1.4.16.01 4.1.4.16.05 4.1.4.17 4.1.4.17.01 4.1.4.18 4.1.4.18.02 4.2 4.2.1 4.2.1.01 4.2.1.01.01 4.2.1.01.03 4.2.1.02	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan Inseminasi Buatan Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Jasa Giro Pemegang Kas Penerimaan Bunga Deposito Rekening Deposito Pada Bank Jateng Rekening Deposito Pada BRI Rekening Deposito Pada BNI 46 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Kerugian Uang Kerugian Barang Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pendapatan Dari Pengembalian Pendapatan dari Pengembalian Belanja Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan Pendapatan BLUD Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Pendapatan BLUD Puskesmas Hasil dari pengelolaan dana bergulir Hasil dari pengelolaan dana bergulir Pendapatan Lain-lain Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	50.000.000,00 1.900.000,00 4.010.000.000,00 4.000.000.000,00 10.000.000,00 12.650.000.000,00 9.000.000.000,00 2.250.000.000,00 1.400.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 1.374.434.935,00 1.374.434.935,00 0,00 126.900.224.000,00 84.000.000.000,00 42.900.224.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.151.164.532.000,00 38.685.308.000,00 23.816.185.000,00 8.973.485.000,00 14.842.700.000,00 14.869.123.000,00	Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016 Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	9.000.000.000,00	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	9.000.000.000,00	
4.3.1.03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	384.000.000,00	
4.3.1.03.01	PT. Tita Investama	40.000.000,00	
4.3.1.03.02	Aqua Farm	44.000.000,00	
4.3.1.03.03	PT. Geodipa	300.000.000,00	
4.3.1.06	Hibah Dana BOS	79.075.850.000,00	
4.3.1.06.01	Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri	79.075.850.000,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	84.278.823.000,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	84.278.823.000,00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	19.152.878.000,00	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.216.465.000,00	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.173.331.000,00	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	98.349.000,00	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Pajak Rokok	31.637.800.000,00	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	
4.3.5.01.01	FEDEP	0,00	
4.3.5.01.02	TMMD	0,00	
4.3.5.01.03	Profil Daerah	0,00	
4.3.5.01.07	Bantuan Sarana Prasarana	0,00	
4.3.5.01.08	Bantuan Pendidikan	0,00	
4.3.5.01.10	PUS	0,00	
4.3.5.01.11	TKPKD	0,00	
4.3.5.01.12	GAKY	0,00	
4.3.5.01.15	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	
4.3.6	Dana Desa	184.100.308.000,00	
4.3.6.01	Dana Desa Yang Bersumber dari APBN	184.100.308.000,00	
4.3.6.01.01	Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	184.100.308.000,00	
4.3.7	Dana Insentif Daerah	8.750.000.000,00	
4.3.7.01	Dana Insentif Daerah dari APBN	8.750.000.000,00	
4.3.7.01.01	Dana Insentif Daerah dari APBN	8.750.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5	BELANJA		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.891.614.169.500,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	1.072.558.250.117,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	765.720.200.117,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	684.056.414.289,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	374.964.044.705,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	47.635.929.573,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	7.898.561.250,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	26.347.751.800,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	4.349.242.500,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.936.736.360,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.835.872.547,00	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.182.043,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	12.232.159.211,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	86.058.000,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komite	34.530.300,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	72.349.200,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	35.626.500,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	10.048.500,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	84.772.800,00	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	4.548.000.000,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	26.800.000,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	430.290.000,00	
5.1.1.01.21	Tunjangan Profesi guru	289.800.000,00	
5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja dan Kematian	162.134.300.000,00	
5.1.1.01.23	Tunjangan Khusus Guru	3.540.206.000,00	
5.1.1.01.24	Tunjangan Transportasi	904.153.000,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.650.000.000,00	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	71.797.000.000,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	71.797.000.000,00	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.687.500.000,00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	5.670.000.000,00	
5.1.1.03.03	Tunjangan Reses	600.000.000,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.417.500.000,00	
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.747.125.000,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.747.125.000,00	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	432.160.828,00	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	432.160.828,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.4	Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan KONI KWARCAB PRAMUKA PMI KORPRI DHARMA WANITA Belanja Hibah Dana BOP PAUD Belanja Hibah Dana BOP PAUD Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Pantti Asuhan/Panti Rehabilitasi Belanja Bantuan Sosial Orsos PACA Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Stimulan Perumahan Kepada Masyarakat Miskin Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Belanja Alokasi Dana Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat yang Bersumber dari APBN Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembayaran Kompensasi Perangkat Desa Pendamping Replika PLPBK TMMD Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai HANURA	15.582.600.000,00 960.000.000,00 210.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 14.622.600.000,00 14.622.600.000,00 7.560.500.000,00 85.500.000,00 60.000.000,00 25.500.000,00 7.475.000.000,00 7.475.000.000,00 4.205.492.000,00 3.355.250.000,00 3.355.250.000,00 850.242.000,00 850.242.000,00 274.489.458.000,00 273.415.058.000,00 88.100.000.000,00 184.100.308.000,00 314.750.000,00 600.000.000,00 300.000.000,00 1.074.400.000,00 209.192.000,00 209.528.000,00 84.682.000,00	
5.1.4.05			
5.1.4.05.01			
5.1.4.05.02			
5.1.4.05.03			
5.1.4.05.04			
5.1.4.05.05			
5.1.4.05.09			
5.1.4.07			
5.1.4.07.01			
5.1.5			
5.1.5.01			
5.1.5.01.01			
5.1.5.01.02			
5.1.5.03			
5.1.5.03.01			
5.1.6			
5.1.6.03			
5.1.6.03.01			
5.1.6.05			
5.1.6.05.01			
5.1.7			
5.1.7.03			
5.1.7.03.01			
5.1.7.03.02			
5.1.7.03.03			
5.1.7.03.04			
5.1.7.03.05			
5.1.7.05			
5.1.7.05.01			
5.1.7.05.02			
5.1.7.05.03			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan	92.086.000,00	
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai NASDEM	82.781.000,00	
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai GOLKAR	101.637.000,00	
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrat	75.473.000,00	
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai GERINDRA	93.481.000,00	
5.1.7.05.09	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional	79.864.000,00	
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PKS	45.676.000,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	819.055.919.383,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	45.902.393.695,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	14.111.120.509,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.289.609.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	370.055.000,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	2.355.790.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Inventaris Barang	10.800.000,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Koordinator/ Operator	213.360.000,00	
5.2.1.01.07	Honorarium Tim Angka Kredit	133.810.000,00	
5.2.1.01.09	Honorarium PLT	41.725.000,00	
5.2.1.01.10	Honorarium Petugas Piket	278.457.500,00	
5.2.1.01.11	Honorarium Sidang Tim	7.326.831.000,00	
5.2.1.01.12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	243.063.000,00	
5.2.1.01.13	Honorarium Kepanitiaan	847.620.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.495.485.000,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.188.975.000,00	
5.2.1.02.03	Honorarium pengurus organisasi/kelembagaan	1.984.150.000,00	
5.2.1.02.04	Honorarium petugas piket	174.450.000,00	
5.2.1.02.07	Intensif Penjaga Bendung, Petugas PMK dan Petugas Lainnya	107.950.000,00	
5.2.1.02.09	Honorarium Petugas Laboratorium	39.960.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	1.642.552.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.534.498.000,00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	108.054.000,00	
5.2.1.04	Belanja Pegawai Dana BOS	11.177.852.691,00	
5.2.1.04.01	Belanja Pegawai Dana BOS	11.177.852.691,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.1.06	Belanja Pegawai BLUD	15.475.383.504,00	
5.2.1.06.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	8.595.956.644,00	
5.2.1.06.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	6.879.426.860,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	411.519.176.980,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.489.251.021,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.303.810.169,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	420.461.515,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	166.534.500,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	478.418.781,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	262.480.372,00	
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.510.000,00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.840.000,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	4.500.000,00	
5.2.2.01.10	Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor	1.399.843.814,00	
5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.440.851.870,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.889.409.020,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.364.780.640,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	518.890.350,00	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	42.000.000,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.437.134.356,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	65.381.000,00	
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	3.300.000,00	
5.2.2.02.09	Belanja Perlengkapan Rumah Dinas	17.000.000,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	4.680.576.910,00	
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Praktek	320.716.000,00	
5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pengumuman dan Sejenisnya	1.700.000,00	
5.2.2.02.13	Belanja Bahan Percontohan/ Alat Peraga/ Sampel	436.652.500,00	
5.2.2.02.14	Belanja Bahan Sarana Belajar Mengajar	30.850.000,00	
5.2.2.02.15	Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi	436.462.400,00	
5.2.2.02.17	Belanja Bahan dan Alat Rumah Tangga	32.695.100,00	
5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Alat Pertanian	22.192.000,00	
5.2.2.02.19	Belanja Pakan Ternak	42.000.000,00	
5.2.2.02.20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	313.862.500,00	
5.2.2.02.21	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan	123.215.270,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	115.911.146.788,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	754.306.600,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	529.980.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5. 2. 2. 03. 03	Belanja Listrik	1.165.762.911,00	
5. 2. 2. 03. 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	291.722.000,00	
5. 2. 2. 03. 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	846.460.000,00	
5. 2. 2. 03. 07	Belanja Paket/Pengiriman	12.892.000,00	
5. 2. 2. 03. 08	Belanja Sertifikasi	217.775.000,00	
5. 2. 2. 03. 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	5.658.459.000,00	
5. 2. 2. 03. 12	Belanja Pajak Penerangan jalan Umum (PPJU)	18.900.995.697,00	
5. 2. 2. 03. 13	Belanja Air Time Radio Swasta	11.150.000,00	
5. 2. 2. 03. 14	Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan	3.243.144.000,00	
5. 2. 2. 03. 15	Belanja jasa General Chek Up	50.161.500,00	
5. 2. 2. 03. 16	Belanja Ulang saku kegiatan/rapat	14.114.490.000,00	
5. 2. 2. 03. 17	Belanja Retribusi Kebersihan/korpat	4.760.000,00	
5. 2. 2. 03. 18	Belanja Jasa PHL/ Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	5.157.488.000,00	
5. 2. 2. 03. 19	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	6.500.000,00	
5. 2. 2. 03. 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	8.354.988.340,00	
5. 2. 2. 03. 21	Belanja jasa service dan Penggantian komponen	1.700.035.640,00	
5. 2. 2. 03. 22	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	6.950.000,00	
5. 2. 2. 03. 23	Belanja Propaganda, Penerangan dan publikasi	507.211.500,00	
5. 2. 2. 03. 25	Belanja Perawatan alat Kesehatan dan Laboratorium	12.600.000,00	
5. 2. 2. 03. 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	4.720.295.100,00	
5. 2. 2. 03. 28	Belanja Jasa Pelayanan Medis	1.960.736.500,00	
5. 2. 2. 03. 29	Belanja Jasa Biro Perjalanan	1.634.101.400,00	
5. 2. 2. 03. 31	Belanja Jasa/Pengadaan/Pemeliharaan/Penyesuaian Sistem Aplikasi	337.189.150,00	
5. 2. 2. 03. 32	Belanja Juran kepesertaan	7.874.462.500,00	
5. 2. 2. 03. 34	Belanja stimulan pembangunan	5.761.500.000,00	
5. 2. 2. 03. 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.745.081.950,00	
5. 2. 2. 03. 36	Belanja Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan	3.450.000,00	
5. 2. 2. 03. 37	Belanja Jasa administrasi Perijinan Penyerahan	3.500.000,00	
5. 2. 2. 03. 38	Belanja Jasa administrasi Perijinan	7.500.000,00	
5. 2. 2. 03. 40	Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan	16.200.000,00	
5. 2. 2. 03. 42	Belanja Jasa Tenaga Wiyata Bhakti Tenaga Pendidik/Kependidikan	11.650.900.000,00	
5. 2. 2. 03. 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	4.363.795.000,00	
5. 2. 2. 03. 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	1.340.008.000,00	
5. 2. 2. 03. 45	Belanja Jasa Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	143.500.000,00	
5. 2. 2. 03. 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	492.335.000,00	
5. 2. 2. 03. 47	Belanja jasa pengelolaan LPPL	126.000.000,00	
5. 2. 2. 03. 48	Belanja Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	180.000.000,00	
5. 2. 2. 03. 49	Belanja Pajak ABT	2.760.000,00	
5. 2. 2. 04	Belanja Premi Asuransi	233.587.800,00	
5. 2. 2. 04. 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	194.736.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.04.03	Belanja premi asuransi non PNS	38.851.800,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.006.481.180,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	596.676.000,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.830.844.000,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.095.083.730,00	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	700.000,00	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	481.477.450,00	
5.2.2.05.09	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	5.947.663.061,00	
5.2.2.05.01	Belanja Cetak	3.737.467.360,00	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	2.124.546.601,00	
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	85.649.100,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.364.765.000,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	901.050.000,00	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	57.750.000,00	
5.2.2.07.05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	862.560.000,00	
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Tanah	250.405.000,00	
5.2.2.07.07	Belanja Sewa panggung/Stan	293.000.000,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	945.150.000,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	945.150.000,00	
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	130.997.500,00	
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	3.083.500,00	
5.2.2.09.02	Belanja Sewa Buldoser	2.914.000,00	
5.2.2.09.03	Sewa alat-alat berat	125.000.000,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	868.842.500,00	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	79.252.500,00	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	7.725.000,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	178.030.000,00	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	176.200.000,00	
5.2.2.10.07	Belanja sewa alat Elektronik	323.905.000,00	
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Alat Rumah tangga	15.930.000,00	
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Alat-alat Tradisional	19.000.000,00	
5.2.2.10.11	Belanja Sewa alat-alat Sarana perlengkapan olahraga	4.950.000,00	
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Peralatan Praktek	63.850.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.135.657.280,00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	564.980.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.604.474.030,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.005.261.000,00	
5.2.2.11.04	Belanja Extra Fooding	364.252.000,00	
5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	7.208.847.750,00	
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan Minumran Lembur	264.670.000,00	
5.2.2.11.07	Belanja Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Pasien	123.172.500,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	572.920.500,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	142.880.600,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	37.100.000,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	41.970.000,00	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.000.000,00	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	14.750.000,00	
5.2.2.12.07	Belanja Kelengkapan pakaian Dinas	104.685.000,00	
5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	216.534.900,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	213.975.000,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	206.975.000,00	
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Kerja Identitas	7.000.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	688.223.500,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	45.938.000,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	24.175.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	417.615.000,00	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Paskibra	71.590.000,00	
5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	42.100.000,00	
5.2.2.14.07	Belanja Kelengkapan Pakaian (Rompi dll)	13.475.500,00	
5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Seragam Tim	73.330.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.158.832.583,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.328.129.100,00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.830.703.483,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	32.100.000,00	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	32.100.000,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.846.675.250,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.823.350.000,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	11.325.250,00	
5.2.2.17.04	Belanja Seminar, lokakarya	12.000.000,00	
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	7.680.000,00	
5.2.2.18.02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	7.680.000,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	115.625.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan Lainnya	14.800.000,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Peralatan	100.825.000,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.412.100.000,00	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	125.500.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.236.600.000,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
5.2.2.22	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	55.415.164.184,00	
5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	55.415.164.184,00	
5.2.2.23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.773.497.500,00	
5.2.2.23.01	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.176.232.500,00	
5.2.2.23.02	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.311.361.000,00	
5.2.2.23.03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	24.285.904.000,00	
5.2.2.25	Belanja Operasional Sekolah Negeri	1.965.000.000,00	
5.2.2.25.01	Belanja Operasional TK / PAUD	45.000.000,00	
5.2.2.25.03	Belanja Operasional SMP Negeri	1.920.000.000,00	
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	109.205.506.313,00	
5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	75.170.613.356,00	
5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	34.034.892.957,00	
5.2.2.27	Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	630.998.000,00	
5.2.2.27.01	Belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	630.998.000,00	
5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	2.557.928.000,00	
5.2.2.28.01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	2.468.028.000,00	
5.2.2.28.02	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	89.900.000,00	
5.2.3	Belanja Modal	361.634.348.708,00	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	4.585.000.000,00	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	4.585.000.000,00	
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	500.000.000,00	
5.2.3.14.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader	500.000.000,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	10.000.000,00	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	10.000.000,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.320.575.000,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.235.000.000,00	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	160.000.000,00	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.332.400.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procecing Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	593.175.000,00	
5.2.3.21		50.000.000,00	
5.2.3.21.01		50.000.000,00	
5.2.3.23		100.000.000,00	
5.2.3.23.07		100.000.000,00	
5.2.3.24		130.100.000,00	
5.2.3.24.09		130.100.000,00	
5.2.3.25		1.244.681.000,00	
5.2.3.25.02		900.000.000,00	
5.2.3.25.06		274.130.000,00	
5.2.3.25.08		70.551.000,00	
5.2.3.26		155.000.000,00	
5.2.3.26.04		155.000.000,00	
5.2.3.27		3.435.486.325,00	
5.2.3.27.04		222.575.000,00	
5.2.3.27.05		3.212.911.325,00	
5.2.3.28		3.579.683.702,00	
5.2.3.28.01		1.459.689.000,00	
5.2.3.28.03		2.000.000,00	
5.2.3.28.04		69.600.000,00	
5.2.3.28.05		4.350.000,00	
5.2.3.28.06		1.878.433.902,00	
5.2.3.28.07		165.610.800,00	
5.2.3.29		7.190.372.996,00	
5.2.3.29.01		299.290.000,00	
5.2.3.29.02		5.436.624.356,00	
5.2.3.29.04		188.846.640,00	
5.2.3.29.05		1.263.112.000,00	
5.2.3.29.06		2.500.000,00	
5.2.3.30		4.992.000,00	
5.2.3.30.03		4.992.000,00	
5.2.3.31		257.155.000,00	
5.2.3.31.01		105.105.000,00	
5.2.3.31.02		140.300.000,00	
5.2.3.31.06		11.750.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	150.148.300,00	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	63.648.300,00	
5.2.3.32.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	35.000.000,00	
5.2.3.32.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	51.500.000,00	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	233.100.583,00	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	184.700.000,00	
5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	3.000.000,00	
5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	12.700.000,00	
5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.500.000,00	
5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	7.766.000,00	
5.2.3.34.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	17.434.583,00	
5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	5.000.000,00	
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	9.940.869.000,00	
5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	9.940.869.000,00	
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	951.500.000,00	
5.2.3.36.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi	100.000.000,00	
5.2.3.36.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	417.187.500,00	
5.2.3.36.55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	434.312.500,00	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	4.962.343.605,00	
5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	94.500.000,00	
5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	7.749.600,00	
5.2.3.37.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah	3.925.000.000,00	
5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	225.000.000,00	
5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	100.000.000,00	
5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	5.850.000,00	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	604.244.005,00	
5.2.3.39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	2.100.000,00	
5.2.3.39.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	2.100.000,00	
5.2.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	301.617.000,00	
5.2.3.42.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	301.617.000,00	
5.2.3.45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralengkapan Non Senjata Api	200.000.000,00	
5.2.3.45.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	200.000.000,00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	10.000.000,00	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanaan	10.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.76.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	400.000.000,00	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	10.145.594.236,00	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	10.145.594.236,00	
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	408.345.000,00	
5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	408.345.000,00	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	100.000.000,00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	100.000.000,00	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.185.000.000,00	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.185.000.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(169.050.346.000,00)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	179.050.346.000,00	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	179.050.346.000,00	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	179.050.346.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	
6.2.2.2	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00	
6.2.2.2.02	Penyertaan Modal pada PDAM	10.000.000.000,00	
6.2.2.2.02.03			
PEMBIAYAAN NETTO		169.050.346.000,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4



BUPATI WONOSOBO,
 EKO PURNOMO